

TATA NASKAH DINAS

2025

PERGUB JATENG NO. 1, BD 2025/ NO. 1, 161 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 63 Tahun 2019; PERDA PROV DAERAH TINGKAT I No. 9 Tahun 1984; PERDA PROV JATENG No. 8 Tahun 2023; PERDA PROV JATENG No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jateng Nomor 5 Tahun 2022; PERKA ANRI No. 5 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2023.

- Peraturan Gubernur ini mengatur maksud Peraturan Gubernur untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2025.

- Dalam hal yang sifatnya mendesak, Gubernur dapat menerbitkan kebijakan tata naskah dinas selain yang diatur dalam peraturan ini dengan Surat Edaran.

- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah dan Ketentuan penomoran dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah.

- Lampiran : 134 hlm.